

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah negara terutama bagi negara Indonesia. Pajak dibayar oleh masyarakat dan sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Sebagian besar wajib pajak tidak ada yang secara sukarela atau dengan senang hati untuk membayar pajak. Tetapi, wajib pajak hanya berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin agar tidak mengurangi pendapatan atau laba bersih perusahaan. Wajib pajak dalam hal ini adalah perusahaan yang juga termasuk sebagai wajib pajak badan merupakan kontribusi terbesar penerimaan pajak negara. Perusahaan menganggap pajak merupakan beban yang akan mengurangi keuntungan perusahaan. Hal itu yang menyebabkan perusahaan cenderung untuk meminimalkan beban pajak tersebut agar mencapai laba yang optimal. Hal tersebut disebabkan karena adanya peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan celah dari kelemahan peraturan perpajakan.

Salah satu peluang yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melakukan kecurangan pajak adalah melalui tindakan agresivitas pajak. Semakin banyak celah yang dipakai perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak atau penghematan pajak maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif dalam pajak. Agresivitas pajak merupakan tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang akan dibayar. Agresivitas pajak dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara legal (*tax avoidance*) dan ilegal (*tax evasion*).

Berikut ini adalah beberapa fenomena mengenai agresivitas pajak yang terjadi pada perusahaan:

Tabel 1.1 Fenomena mengenai Agresivitas Pajak yang terjadi pada Perusahaan

No.	Nama Perusahaan	Fenomena
1.	PT Cardig Aero Service Tbk (CASS) (2018)	PT Cardig Aero Service berusaha melakukan penghindaran pajak dengan mengajukan keberatan dan banding atas pajak kurang bayar PPh Badan sebesar Rp. 3 Miliar yang di sampaikan pihak Otoritas Pajak. Kasus ini bermula ketika Ditjen Pajak melakukan koreksi PPh Badan PT Cardig Aeri Service Tbk untuk tahun pajak 2016. Pengadilan pajak memutuskan menolak banding Cardig Aero Service karena dinilai tidak memenuhi syarat [1].
2.	PT XL Axiata Tbk (EXCL) (2014)	PT XL Axiata dan PT Axis Telecom Indonesia memiliki potensi penghindaran pajak yaitu pada mekanisme pembayaran sisa hutang Axis kepada pemegang saham existing. Sebelum PT XL Axiata mengakuisisi PT Axis Telecom, Axis sudah menerapkan mekanisme membesarkan hutang. Oleh sebab itu, jumlah hutang jauh lebih besar dari jumlah modal. PT XL Axiata mengakuisi PT Axis Telecom Indonesia menggunakan nilai buku sebesar US\$ 865 juta dan akan digunakan untuk membayar hutang kepada pemegang saham Axis yaitu existing. Oleh sebab itu, Axis dijual berdasarkan nilai hutangnya kepada pemegang saham agar revaluasi aset tetap berubah dan dapat meringankan pajak bagi perusahaan [2].
3.	Cikarang Listrindo Tbk (POWR)	Ada sekitar 2.961 nama dari indonesia yang terindikasi tindakan penghindaran pajak, di bekasi sendiri ada nama nya PT.Cikarang Listrindo yang tercantum dalam daftar panamas papers. Adanya warga negara dan perusahaan Indonesia yang disebut merupakan kejahatan keuangan, seperti pengemplangan pajak [3]

Berdasarkan Tabel 1.1 terdapat beberapa perusahaan melakukan praktik agresivitas pajak dengan berbagai cara, adapun tujuannya adalah untuk meminimalkan beban pajak terutang yang ditanggung oleh perusahaan. Karena memperoleh laba yang tinggi, membuat perusahaan harus membayar beban pajak yang besar. Oleh karena itu, perusahaan tersebut berusaha untuk menutupi keuntungan yang diperoleh dengan berbagai cara seperti membesarkan hutang, mencatatkan rugi dan serta memanipulasi laporan keuangan.

Ditinjau dari segi ekonomi, pajak merupakan beban bagi wajib pajak khususnya bagi para pelaku bisnis sebagai wajib pajak badan. Artinya, perusahaan wajib membayar beban pajak sebagai salah satu wujud tanggung jawab dari perusahaan. Jika perusahaan tersebut sudah *go public*, maka keuntungan dari perusahaan tersebut akan

berkurang, sehingga akan berdampak terhadap laporan keuangan khususnya laporan laba/rugi. Artinya, akan berdampak juga terhadap investor atau para pemegang saham perusahaan. Oleh sebab itu, para pelaku bisnis melakukan pengurangan terhadap beban pajak penghasilan. Untuk mewujudkan tindakan tersebut perusahaan melakukan cara legal maupun ilegal salah satunya adalah praktik manajemen laba.

Pada prinsipnya manajemen laba merupakan metode yang dipilih dalam menyajikan informasi laba kepada publik yang sudah disesuaikan dengan kepentingan dari pihak manajer itu sendiri atau menguntungkan perusahaan dengan cara menaikkan ataupun menurunkan laba perusahaan. Hal itu akan menyebabkan kualitas laba dari perusahaan akan rendah, sehingga berpotensi membuat diskresi atau keputusan manajemen disalahgunakan untuk melakukan manajemen laba. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak [4]. Hasil penelitian lain menyatakan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak [5].

Beberapa faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak melalui manajemen laba yaitu terdiri dari *Corporate Social Responsibility*, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan.

Faktor pertama yang mempengaruhi agresivitas pajak melalui manajemen laba adalah *corporate social responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan yang melakukan kegiatan CSR dan mengungkapkannya dalam laporan keuangan memperoleh manfaat berupa citra positif dari masyarakat maupun investor. Citra positif dari kegiatan dan pelaporan CSR tersebut dapat menjadi peluang bagi manajemen untuk melakukan tindakan manajemen laba. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan CSR memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba [6] dan penelitian lainnya menunjukkan CSR tidak berpengaruh terhadap manajemen laba [7]. Secara tidak langsung investor maupun pengguna laporan keuangan lainnya telah memberikan penilaian yang baik pada perusahaan. Hal ini akan berdampak terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan CSR tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak [8] dan penelitian lainnya menunjukkan CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak [9].

Faktor kedua yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak melalui manajemen laba adalah kualitas audit. Kualitas audit adalah kinerja auditor dalam proses

pengauditan yang sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), keahlian auditor, dan kode etik profesi akuntan publik. Peran auditor dibutuhkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan. Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan. Laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh auditor yang berkualitas akan menghasilkan informasi yang lebih berkualitas dibandingkan dengan informasi yang dihasilkan oleh auditor yang tidak berkualitas. Semakin berkualitas auditor, maka tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan diharapkan tidak akan terjadi. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa kualitas audit tidak memiliki pengaruh yang negatif terhadap manajemen laba [10] dan hasil penelitian lainnya menyatakan kualitas audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba [11]. Hal ini akan berpengaruh terhadap kegiatan agresivitas pajak karena semakin berkualitasnya auditor yang di pakai oleh perusahaan. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan kualitas audit berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak [9] dan hasil penelitian lainnya menunjukkan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak [12].

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak melalui manajemen laba adalah kepemilikan institusional. kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga. Besarnya kepemilikan institusional menunjukan pengawasan yang ketat oleh pihak eksternal perusahaan. Pemilik institusi memiliki tanggung jawab untuk melakukan *monitoring* dan mengawasi manajemen dengan wajar untuk mengawal modal mereka dalam perusahaan. Hal tersebut menggambarkan bahwa kepemilikan institusional dapat memperkecil kemungkinan terjadinya manajemen laba karena investor institusional dapat melakukan *monitoring* dan dianggap tidak mudah dibodohi oleh tindakan manajer. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba [13] dan hasil penelitian lainnya menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen laba [14]. Oleh karena itu, tingkat manajemen laba akan mempengaruhi perilaku agresif pajak perusahaan. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak [9] dan hasil penelitian yang lain menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak [15].

Faktor keempat yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak melalui manajemen laba adalah *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang menandakan besarnya modal eksternal yang digunakan perusahaan sebagai biaya operasional perusahaan. *Leverage* dihitung dengan menandakan seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan berasal dari modal pinjaman perusahaan, atau bisa juga disebut berapa banyaknya utang yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan akan berusaha memenuhi perjanjian hutang agar memperoleh penilaian yang baik dari kreditur. Hal ini kemudian dapat memotivasi manajer melakukan manajemen laba untuk menghindari pelanggaran perjanjian hutang. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen laba [16] dan hasil penelitian lainnya menyatakan *leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen laba [11]. Hal tersebut juga dapat mempengaruhi agresivitas perusahaan. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak [8] dan penelitian lain menyatakan *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak [17].

Faktor terakhir yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak melalui manajemen laba adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat diklasifikasikan menurut besar kecilnya perusahaan. Perusahaan yang besar cenderung lebih diperhatikan oleh pihak-pihak eksternal sehingga manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengelola keuangannya. Besarnya perhatian pihak luar tersebut membuat manajemen berpikir dua kali untuk melakukan manajemen laba. Penelitian sebelumnya menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba [16] dan hasil penelitian lain menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba [18]. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena di dasari oleh teori kekuasaan politik yang mengungkapkan bahwa perusahaan besar cenderung akan lebih mudah untuk mempengaruhi peraturan pemerintah dalam hal perpajakan. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak [8] dan penelitian lainnya menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak [19]

Berdasarkan uraian di atas, dapat terlihat bahwa adanya perbedaan hasil penelitian (*Research Gap*) yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak dengan Manajemen Laba sebagai Variabel

Intervening pada Perusahaan Infrastruktur Utilitas dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Periode 2014-2018”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah *Corporate Social Responsibility*, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Infrastruktur Utilitas dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Periode 2014-2018?
2. Apakah *Corporate Social Responsibility*, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan Manajemen Laba berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Infrastruktur Utilitas dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Periode 2014-2018?
3. Apakah *Corporate Social Responsibility*, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak Melalui Manajemen Laba pada Perusahaan Infrastruktur Utilitas dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Periode 2014-2018?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Peneliti membatasi masalah pada ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Variabel Dependen

Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Agresivitas Pajak yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR).

2. Variabel Independen

Variabel Independen dalam penelitian ini ada 5 variabel yakni:

- a. *Corporate Social Responsibility* diukur dengan menggunakan proksi indeks pengungkapan *corporate social responsibility*.
- b. Kualitas Audit
- c. Kepemilikan Institusional
- d. *Leverage* diproksikan dengan menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR)

e. Ukuran Perusahaan

3. Variabel Intervening

Variabel Intervening dalam penelitian ini adalah Manajemen Laba yang dihitung menggunakan *Modified Jones Model*.

4. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Infrastruktur Utilitas dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

5. Periode pengamatan dilakukan pada periode 2014 sampai dengan 2018.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan ruang lingkup maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Infrastruktur Utilitas dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Periode 2014-2018.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan Manajemen Laba berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Infrastruktur Utilitas dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Periode 2014-2018.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak melalui Manajemen Laba pada Perusahaan Infrastruktur Utilitas dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Periode 2014-2018.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini bagi beberapa pihak antara lain :

1. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta manfaat yaitu mampu menyusun laporan keuangan tanpa melakukan manajemen laba sehingga fungsi dari laporan keuangan dapat terpenuhi dan perusahaan dapat mempertimbangkan risiko strategi operasional perusahaan mengenai perpajakan.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada investor sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi serta memberikan informasi tentang manajemen laba berdasarkan agresivitas pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk melakukan pengembangan penelitian dengan variabel *Corporate Social Responsibility*, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak serta dapat menambah informasi dan wawasan tentang agresivitas pajak.

1.6. Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang berjudul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Kualitas Audit, dan Kepemilikan Institusional Pada Agresivitas Pajak” [9].

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah:

1. Variabel Independen

Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen *Corporate Social Responsibility*, Kualitas Audit, dan Kepemilikan Institusional. Pada penelitian ini variabel independen yang diteliti adalah *Corporate Social Responsibility*, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan. Alasan peneliti menambahkan variabel adalah sebagai berikut:

a. *Leverage*

Penambahan jumlah hutang akan menyebabkan adanya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Adanya utang maka dapat membuka kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Kaitannya

dengan pajak karena bunga ditetapkan sebagai beban yang dapat mengurangi pajak.

b. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat dilihat dengan berbagai cara seperti dari total aset, nilai pasar saham, dan lain-lain. Perusahaan dengan skala yang lebih besar akan memiliki aktivitas operasi perusahaan yang lebih banyak dan rumit sehingga banyak terdapat kesempatan untuk memanfaatkan keputusan agresivitas pajak.

2. Variabel Intervening

Penelitian ini menambahkan variabel intervening yaitu Manajemen laba. Manajemen laba merupakan suatu cara dalam menyajikan informasi laba kepada publik yang sudah disesuaikan dengan kepentingan dari pihak manajer itu sendiri atau menguntungkan perusahaan dengan cara menaikkan ataupun menurunkan laba perusahaan [5]. Alasan peneliti menambahkan Manajemen laba sebagai variabel intervening adalah jika perusahaan mendapatkan laba yang tinggi maka hal itu membuat perusahaan membayar pajak yang besar sehingga dapat memotivasi manajer melakukan manajemen laba. Semakin agresif perusahaan melakukan manajemen laba maka dapat dikatakan tingkat agresivitas pajak perusahaan juga tinggi karena beban pajak semakin kecil.

3. Objek Pengamatan

Penelitian sebelumnya melakukan objek pengamatan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan pada penelitian ini melakukan objek pengamatan pada perusahaan Infrastruktur Utilitas dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan peneliti mengubah objek pengamatan karena Infrastruktur dan sarana transportasi sangat dibutuhkan di negara ini. perusahaan infrastruktur Utilitas dan Transportasi merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan dan penghubung aktivitas ekonomi.

4. Periode Pengamatan

Periode pengamatan pada penelitian terdahulu dimulai dari tahun 2013-2015 sedangkan periode pengamatan pada penelitian ini dimulai tahun 2014-2018.